



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

INFORMASI / RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017

01 Pendahuluan

Informasi / Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2017 Merupakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2017 untuk mendapatkan umpan balik (feed back) dari Masyarakat

02 Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis
Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Terletak pada koordinat 106036"-106042" Bujur Timur (BT) dan 606"-6013" Lintang Selatan (LS). Kota Tangerang memiliki luas 164.55 km² atau sekitar 1.59% dari luas Propinsi Banten dengan ketinggian rata-rata 15.99m-Hatta seluas 19.69 km². Secara administratif Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan 990 Rukun Warga (RW) dan 5.000 Rukun Tetangga (RT) yang berbatasan Kec. Teluknaga, Kec. Kosambi dan Kec. Sepatan (Kab. Tangerang) di sebelah utara, Kec. Curug (Kab. Tangerang) serta Kec. Serpong Utara dan Kec. Pondok Aren (Kota Tangsel) di sebelah selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan (DKI Jakarta) di sebelah Timur, Kec. Pasar Kemis dan Kec. Cikupa (Kab. Tangerang) di sebelah Barat

03 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2017 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tercatat sebesar 1.671.381 jiwa. Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dipengaruhi oleh adanya data penduduk ganda dan pemutakhiran NIK dari KTP manual menjadi KTP-el. Kota Tangerang sebagai wilayah hinterland pertumbuhan penduduknya tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas) tetapi juga oleh perpindahan (migrasi). Grafik 1

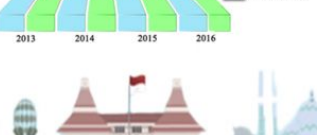


Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 10.134 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Cibodas sebesar 17.443 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Nagari yaitu sebesar 6.709 jiwa/km². Perkembangan pembangunan manusia di Kota Tangerang terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka IPM secara konsisten selama periode 2013-2017. Di mana, IPM Kota Tangerang naik sebesar 2,25% dalam jangka waktu lima tahun. Pengembangan program layanan kesehatan, partisipasi sekolah, perbaikan sanitasi lingkungan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan dan pengetahuan. Pelaksanaan program-program tersebut secara langsung berdampak terhadap angka IPM Kota Tangerang. Tahun 2017, perkiraan IPM Kota Tangerang adalah sebesar 77,36%, dengan nilai indikator derajat kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 71,38 tahun, indikator pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masing sebesar 13,67 tahun dan 10,46 tahun.



04 Kondisi Ekonomi

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB di Kota Tangerang selama kurun waktu 2013-2016 cenderung meningkat. Peningkatan PDRB Kota Tangerang didorong oleh beberapa sektor ekonomi. Adapun lapangan usaha yang mendominasi peningkatan PDRB Kota Tangerang masih berada di industri pengolahan. Pada tahun 2016 industri pengolahan menyumbang 30,89% terhadap struktur PDRB Kota Tangerang.



05 Kebijakan Pemerintahan Daerah

A. VISI DAN MISI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun, yaitu "Terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera, dengan masyarakat yang berakhlakul karimah". Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka disusunlah misi daerah sebagai rumusan umum tindakan konkret yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi
3. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi
4. Meningkatkan pembangunan sarana prajana yang memadai dan berkualitas
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

B. PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017, Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;
2. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;
3. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai;
4. Peningkatan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan);
6. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih
7. Konservitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah;
8. Ketahanan Pangan Daerah;
9. Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;
10. Pengatehan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat; dan 11. Inovasi energi.

06 Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya, secara ringkas disampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun perlu diketahui bahwa angka realisasi APBD yang disampaikan masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. PENDAPATAN DAERAH
Penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp3.470.734.253,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.923.396.035.642,00 atau 107,56%. Target dan realisasi pendapatan daerah dapat dilihat dan dideskripsikan dalam diagram batang yang tersusun atas ketiga komponen Pendapatan Daerah seperti yang Grafik Dibawah ini.



B. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 4.491.146.524.148,69 dan direalisasikan sebesar Rp3.888.098.233.190,88 (86,57%). Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan belanja tidak langsung sebesar Rp1.343.886.886.059,31 dan belanja langsung sebesar Rp3.147.259.638.089,38. Alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp3.147.259.638.089,38 diperuntukan bagi pendanaan program dan kegiatan pada 43 SKPD yang meliputi 24 urusan wajib, 5 urusan pilihan, 5 urusan penunjang urusan, 2 urusan pendukung, 1 urusan kesatuan bangsa dan politik, 1 urusan kewilayahan, 270 program dan 1.842 kegiatan. Anggaran dan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 2 dan dideskripsikan dalam diagram batang yang tersusun atas belanja tidak langsung dan belanja langsung

| Isi Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| A. Belanja Tidak Langsung | 1.343.886.886.059,31 | 1.343.886.886.059,31 | 100,00 |
| B. Belanja Langsung | 3.147.259.638.089,38 | 2.544.111.346.990,88 | 80,87 |
| Jumlah | 4.491.146.524.148,69 | 3.888.008.233.190,88 | 86,57 |

C. PEMBIAYAAN DAERAH
Realisasi pembiayaan tahun 2017 dapat dilihat dalam infografis berikut, dimana pada tahun 2017 target pembiayaan adalah sebesar Rp3.647.470.734.253,00, dan terrealisasi sebesar Rp3.923.396.035.642,00.



07 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2017, dapat dipaparkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau
Dapat terlihat dengan capaian indeks pendidikan dari tahun lalu dengan 71,52% meningkat menjadi 72,87%. Upaya pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Pendidikan, Urusan Kepemanduan dan Olahraga dan Urusan Perpustakaan, dengan anggaran sebesar Rp.587.723.693.085,00 terrealisasi sebesar 95,25%. Pencapaian dilaksanakan melalui Program Tangerang Cerdas berupa pemberian bantuan biaya SPP dan biaya prasarana bagi 10.400 siswa SD/MI dan 2.633 siswa SMP/MTs, pemberian insentif guru bagi 4.595 guru TK/RA dan 16.155 guru SD/MI/SMP/MTs, biaya operasional pendidikan bagi 400 SD/MI, 135 SD swasta, 35 SMP/MTs negeri dan 164 SMP swasta, serta pemberian bantuan operasional pendidikan non formal kepada 30 PKBM dengan siswa sebanyak 3.200 siswa/warga belajar.
2. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, & Terjangkau
Terlihat dari pencapaian indeks kesehatan sebesar 78,98% meningkat sebesar 0,07% dari tahun lalu. Upaya dalam rangka Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau ditunjang melalui penyelenggaraan Urusan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp348.141.739.766,00 terrealisasi sebesar 76,08%. Dilaksanakan melalui program Tangerang Sehat melalui penyediaan fasilitas kesehatan diantaranya Ambulans Gratis yang bisa diakses melalui aplikasi Tangerang LIVE, Puskesmas 24 jam dengan fasilitas UKD dan rawat inap, Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisru) yakni sebuah sistem informasi yang terfokus untuk mengantisipasi resiko berbahaya kepada bayi dan ibu melahirkan, program Ceger Jsa merupakan pengembangan dari Home Care, program Babar Bahagia yang mana ketika ibu dan anak pulang dari fasilitas kesehatan maka mereka sudah memiliki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Sistem Informasi Tempat Tidur RAS (Simpati) RAS, yang menyajikan informasi ketersediaan kamar rawat inap di seluruh rumah sakit di wilayah Kota Tangerang dengan sistem yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Pelayanan Sarana-Prasarana yang Layak dan Memadai melalui penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, telah melaksanakan pembangunan sebanyak 2.314 rumah tidak layak huni dan 1.000 jamban sehat, pengendalian banjir dan genangan melalui normalisasi aksi & pengerukan lumpur, perbaikan sistem drainase dan pagedangan pompa air dimana luas genangan berkurang jadi 235 Ha, pelayanan transportasi melalui penanganan 78 titik kemacetan, angkutan umum massal sebanyak 10 bus beroperasi selama 16 jam dengan jumlah penumpang sebanyak 250.597 penumpang.

4. Upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan pelayanan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui Urusan Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Urusan Koperasi dan UKM, dengan anggaran sebesar Rp3.659.168.674,00, terrealisasi sebanyak 96,97%. Pencapaian dilibati dari penunangan angka Tingkat Pengangguran Terbuka saat ini menjadi 7,16% atau berkurang sebesar 0,84% melalui perluasan akses kesempatan kerja melalui pemeran kesempatan kerja tingkat kota dan di 13 kecamatan, penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 3% melalui pemberian pelatihan berupa perbandingan dan elektronik kepada 650 orang terlanar, anak cacat dan anak nakal, pemberian bantuan program KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya sebanyak 1.515 orang/pemberian bantuan jaminan sosial kepada 2.017 orang penyandang cacat fisik, mental dan lanjut usia serta monitoring pendayagunaan bantuan pangan non tunai sebanyak 52.133 keluarga penerima manfaat.

5. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis Penyelenggaraan prioritas pembangunan ini didukung melalui penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp3.975.984.661.953,00 terrealisasi sebesar 91,76%, melalui kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim penatung lingkungan kampung hijau dan kampung iklim yang tersebar di 13 kecamatan berupa bantuan pendampingan pengelolaan dan pemeliharaan sampah, alat biopori, tempat sampah, tanaman pihak dan tanaman produktif. Pelayanan pengangkutan sampah pada tahun 2017, telah melayani sebanyak 1.195.510 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.671.381 jiwa

6. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih Pencapaian prioritas ini melalui penyelenggaraan Urusan Pertahanan, Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Keairan serta Penunjang Urusan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.746.684.947.128,00, terrealisasi sebesar 84,50%. Melalui peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, dimana Pemerintah Kota Tangerang kembali memperoleh Opini WTP dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya, meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi diantaranya aplikasi yang telah terintegrasi yaitu Dashboard Live Berbasis Web, Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA), Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP), SKP Online, E-Absensi E-Office, Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (Laksa) Sistem Informasi Petugas Lapangan (SIGAP) Berbasis Web, Aplikasi Web GIS , Aplikasi Tangerang Live Berbasis Android, Serta Sistem Informasi Evaluasi Dan Pelaporan (SIEVALP)

7. Konservitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah Pencapaian prioritas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan penanaman Modal dan Urusan Perdagangan. Jumlah penanaman modal (investasi) dengan target sebesar 6,30 triliun rupiah dan terrealisasi sebesar 7,68 triliun rupiah atau 125,20% dari target diwujudkan dengan peningkatan investasi dan kemudahan perijinan melalui penerapan kebijakan perizinan satu pintu serta pelayanan online, kemudian berinvestasi juga dilakukan dengan memberikan layanan akhik pekan dan pengimanan pelayanan perizinan keliling di 13 Kecamatan.

8. Konservitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Ketenamangan, Ketertiban Umum Dan Perindangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.12.296.197.350,00, terrealisasi sebesar 96,94%. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, Pemerintah Kota Tangerang bekerjasama dengan seluruh jajaran kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan dan masyarakat

9. Penanganan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat Pencapaian prioritas ini melalui penyelenggaraan Urusan Kebudayaan, dan Urusan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.17.508.592.800,00, terrealisasi sebesar 87,95%. Diantaranya melalui peningkatan kepariwisataan dimana jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebanyak 1.088.700 orang dari target sebanyak 354.773.

08 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Tangerang tidak mendapatkan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Adapun penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tahun anggaran 2016 yaitu Program Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, pada tahun anggaran 2017 telah berubah menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK).

09 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

A. Kerja sama wajib yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 adalah Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi DKI, Pemprov Jabar, Pemprov Banten, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangsel, Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2017. Sedangkan Kerja sama sukarela yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 sebanyak 3 perjanjian kerja sama antara lain dengan Pemerintah Kab. Jepar, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Selatan Kota Balikpapan, Pemkab Pirang, Kab. Purworejo, dan Kota Bandung

B. Kerja sama dengan pihak ketiga, antara lain dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah

C. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran dan bencana lain yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2017, antara lain: meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, melakukan 119 kali operasi pemadam kebakaran, melakukan sosialisasi terkait pencegahan dini dan pengendalian bencana alam di 24 kelurahan

G. Hal Lain-lain
Beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Kota Tangerang pada Tahun 2017, sebagai berikut:

Demikianlah Informasi/Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang yang meliputi aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki sebagai Kepala Daerah. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasamanya yang baik dari semua pihak termasuk jajaran Pemerintah serta masyarakat Kota Tangerang yang telah memberikan dukungannya dalam rangka ikut menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menetapkan strategi kebijaksanaan Pembangunan Daerah pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai visi Kota Tangerang sebagai kota yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah.